

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah pada 1 Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi tiap daerah. Daerah yang kaya sumber daya alam atau sumber penerimaan dan mengeksplorasinya menyambut dengan penuh harapan, sedangkan bagi daerah yang miskin sumber penerimaan menanggapi dengan sedikit rasa pesimis. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Sehingga mendorong serta menjadikan Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri, baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah masih tergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab atas laporan keuangan yang telah disusun dan dilaporkan dalam setiap periode pelaporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan system pengendalian penggunaan anggaran berbasis kinerja. Tanggung jawab penyusunan dari laporan keuangan tersebut, harus ditegaskan secara eksplisit dengan membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik. Menilai kinerja pemerintah daerah melalui beberapa aspek bukan hanya dengan rasio keuangan yang diperoleh dari persentase serapan penggunaan anggaran, tetapi dengan karakteristik pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan. Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan.

Dalam pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan karakteristik sebagai variabel independen. Karakteristik merupakan suatu ciri khusus yang melekat pada daerah, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasisi(2012) karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal dan Temuan Audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variable karakteristik Pemda berpengaruh signifikan terhadap variable independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variable belanja daerah. Variable ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda sedangkan variable belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda.

Penelitian Gideon Simanullang (2013) menguji pengaruh belanja modal, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di provinsi kepulauan riau tahun 2008 – 2012. Populasi dalam penelitian ini yaitu 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang telah memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2008-2012. Dengan hasil Bahwa Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. *Intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan Secara bersamaan bahawa Belanja modal, *Intergovernmental revenue* dan Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini dalam karakteristik pemerintah yang berupa ukuran daerah yang di proksikan dengan jumlah total pendapatan, tingkat kekayaan daerah

yang diproksikan dengan pendapatan Asli daerah (PAD), tingkat ketergantungan pada pusat diproksikan dengan DAU, belanja modal, dan *intergovernmental revenue* diproksikan dengan Dana perimbangan. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu yaitu pagabungan dari variabel penelitian yang semua variable dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman yaitu variable Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Modal, dan *Intergovernmental revenue*.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap kinerja pemerintah Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa karakteristik suatu pemerintah daerah (Pemda) memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota di Jawa Timur untuk tahun anggaran 2010-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi terkait Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi pada khususnya. Diharapkan dari penelitian ini dapat mengembangkan teori yang sudah ada.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat memperbaiki kinerjanya dengan ukuran karakteristik pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah di Jawa Timur.